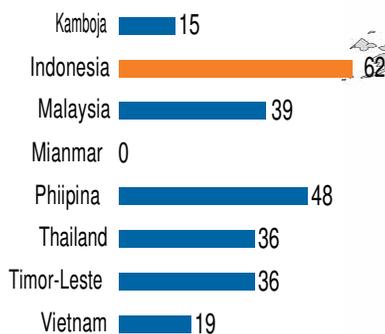


Bagaimanakah Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara?



Skor Indeks Keterbukaan Anggaran
Dari nilai Maksimal 100

81-100 Lengkap

61-80 Substansial

41-60 Beberapa

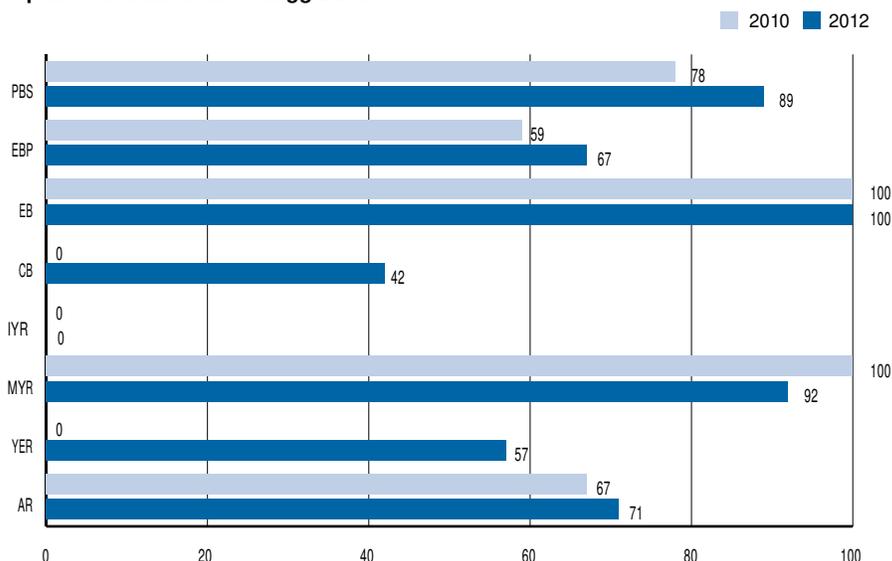
21-40 Sedikit

0-20 Kurang

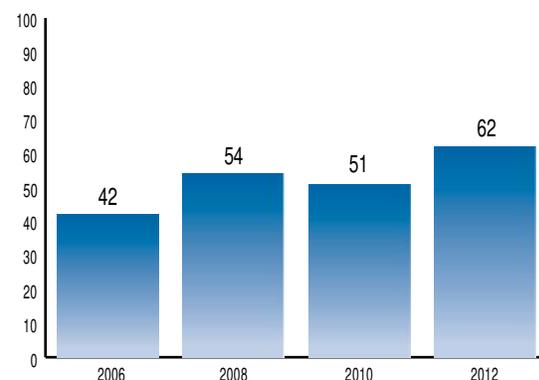
Delapan Dokumen Anggaran Kunci dan Apakah Masyarakat Bisa Mengaksesnya?

Dokumen	Penjelasan Dokumen	Status Publikasi
PBS	Pre-Budget Statement: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal menyediakan informasi yang menghubungkan antar satu kebijakan dengan yang lain dan biasanya ditetapkan dalam parameter yang luas/umum disampaikan kepada legislatif.	Dipublikasikan
EBP	Executive's Budget Proposal: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menjelaskan rencana pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak dan sumber lainnya, serta anggaran yang dialokasikan untuk program-program prioritas, selain untuk mentransformasikan kebijakan dalam bentuk kegiatan	Dipublikasikan
EB	Enacted Budget: Nota Keuangan dan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (UU APBN), sebagai Instrumen yang sah dalam memberikan otoritas kepada eksekutif untuk meningkatkan pendapatan, pembelanjaan dan mengatur hutang	Dipublikasikan
CB	Citizen Budget: Penyajian sederhana dari dokumen anggaran untuk memudahkan publik memahami rencana pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dan membelanjakan anggarannya untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam kebijakan	Dipublikasikan
IYR	In-Year Reports: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periodik (bulanan, dwi-wulan, tri-wulan, atau kuartal) untuk mengukur realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dibandingkan dengan gambaran awal anggaran dan penyesuaiannya.	Dibuat hanya untuk internal
MYR	Mid-Year Review: Laporan Pelaksanaan APBN Semester Pertama berupa ringkasan realisasi anggaran pada pertengahan tahun berjalan serta perubahan pada asumsi ekonomi makro yang mempengaruhi kebijakan anggaran	Dipublikasikan
YER	Year-End Report: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah informasi yang membandingkan antara realisasi pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang ditetapkan	Dipublikasikan
AR	Audit Report: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP adalah audit independen terhadap anggaran pemerintah yang dilakukan oleh sebuah badan audit yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai apakah eksekutif berusaha meningkatkan pendapatan dan menggunakan anggarannya sesuai wewenang. Kemudian, apakah anggaran pemerintah, pendapatan, dan pengeluarannya, sudah sesuai dengan situasi fiskal.	Dipublikasikan

Dari Nol ke-100: Sudahkah Indonesia Meningkatkan Ketersediaan Jumlah Informasi pada 8 dokumen kunci anggaran?



Skor OBI Indonesia Selama Empat Survey



Index Keterbukaan Anggaran

Survey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang disurvei mempublikasikan delapan dokumen kunci anggaran untuk disediakan kepada publik serta menilai apakah dan informasi dalam dokumen sudah lengkap, tepat waktu, dan bermanfaat. Untuk menilai transparansi anggaran pada setiap negara, survey ini menggunakan kriteria internasional yang dikembangkan oleh organisasi multi pihak seperti International Monetary Fund (IMF), organisasi untuk pengembangan kerjasama dan pembangunan (OECD), serta Lembaga Audit International (INTOSA).

Skor Indonesia adalah 62 dari 100, lebih tinggi dari skor rata-rata yaitu 43 dari 100 negara yang disurvei serta tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Skor Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan kepada publik informasi penting pada anggaran pemerintah nasional dan aktivitas keuangannya selama tahun penganggaran. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik.

Skor OBI 2012 Indonesia adalah 62, berarti lebih tinggi dari skor sebelumnya pada OBI 2010 yaitu 51

Indeks keterbukaan anggaran terdiri dari sub skor untuk delapan kunci dokumen anggaran yang dinilai dalam survey. Sub skor tersebut menunjukkan rata-rata skor yang diperoleh dari beberapa pertanyaan pada survey yang mengukur ketersediaan bagi publik dan jumlah informasi dalam dokumen. Sub skor dapat diperbandingkan pada seluruh negara yang survey.

Rekomendasi

Skor Indonesia pada indeks keterbukaan anggaran (OBI) meningkat ditahap awal survey keterbukaan anggaran ini. Skor Indonesia adalah 62 dari 100 di OBI tahun 2012 dan ini adalah skor yang baik, namun pemerintah Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi anggaran melalui beberapa ukuran yang digunakan.

International Budget Partnership (IBP) merekomendasikan Indonesia melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan keterbukaan anggaran:

■ Membuat dan mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun berjalan dimana saat ini dibuat hanya untuk keperluan internal saja (petunjuk detail tentang isi dokumen bisa dilihat di panduan ini: <http://bitly/QGzHv8>). Seperti yang dilaporkan dalam open budget survey tahun 2012, 78 negara sudah mempublikasikan laporan tahunan, termasuk negara tetangga Indonesia yaitu Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Link untuk dokumen anggaran yang dipublikasikan oleh negara-negara tersebut bisa di akses melalui website IBP di <http://bit.ly/P8NOV>.

Sejumlah 95 dari 125 pertanyaan dalam survey keterbukaan anggaran digunakan untuk menghitung skor secara objektif dan dibuat peringkat transparansinya dari setiap negara yang disurvei. Gabungan skor tersebut menghasilkan satu-satunya indeks keterbukaan anggaran (*Open Budget Index/OBI*) yang independen serta memperbandingkan keterbukaan anggaran antar negara.

■ Untuk meningkatkan kelengkapan dalam proposal anggaran eksekutif yaitu RAPBN, dokumen tersebut harus menyediakan informasi sebagai berikut:

- Belanja program individual untuk anggaran tahun berjalan serta anggaran di tahun sebelumnya, termasuk informasi detail belanja dan perhitungan pendapatan yang mencakup periode lebih dari satu tahun (lihat pertanyaan 4, 6, 10 dan 21 dalam kuesioner).

- Menyediakan informasi detail tentang komposisi hutang pemerintah (lihat pertanyaan 13 dalam kuesioner OBS).

- Menyediakan informasi anggaran yang paling tidak menunjukkan perbedaan antara usulan kebijakan anggaran tahun berlaku dengan kebijakan yang sudah ada dan apa dampaknya pada belanja dan pendapatan, hubungan arah kebijakan anggaran dengan data-data non-keuangan, ukuran kinerja untuk anggaran setiap program, serta informasi mengenai kebijakan yang berhubungan langsung dengan kemiskinan (lihat pertanyaan 16, 17 dan 49, 55 dalam kuesioner OBS).

- Menyediakan informasi mengenai dana non-bujeter, aktivitas kuasi fiskal, aset finansial dan non-finansial, tunggakan belanja, kewajiban yang akan datang, belanja pajak, sumber-sumber bantuan donor, (baik yang finansial maupun in-kind), pendapatan yang diperuntukkan, serta anggaran yang bersifat rahasia (lihat pertanyaan 35, 38-41, dan 43-47 dalam kuesioner OBS).

■ Meningkatkan kelengkapan laporan akhir tahun anggaran dengan menjelaskan perbedaan antara nilai awal data non-keuangan, indikator kinerja awal, dan tingkat realisasi anggaran yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin serta realisasi hasilnya (lihat pertanyaan 83, 86, dalam kuesioner OBS).

■ Meningkatkan kelengkapan laporan audit dengan mengumumkan ke publik dana non-bujeter dan menyediakan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah nasional dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan audit. (lihat pertanyaan 91 dan 95 dalam pertanyaan OBS).

■ Meningkatkan kualitas citizen budget (anggaran untuk masyarakat) dengan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada publik, serta membuatnya juga dalam fase perencanaan dan pelaksanaan anggaran (lihat pertanyaan 111 dan 112 dalam pertanyaan OBS)

Kekuatan Legislatif dan Badan Audit Negara Dalam Pengawasan Anggaran

Survey keterbukaan Anggaran (OBS) menguji efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan lembaga audit keuangan. Institusi tersebut memainkan peran yang sangat penting -dan lembaga yang sering diabaikan oleh pemerintah nasional- dalam perencanaan dan pengawasan implementasi anggaran.

Open Budget Survey (OBS) menilai apakah legislatif melakukan pengawasan anggaran secara efektif melalui pengukuran kinerja mereka di 11 indikator, termasuk konsultasi dengan eksekutif sebelum memasukkan draft anggaran, kemampuan riset mereka, pembahasan seluruh kebijakan anggaran, adanya proses pembahasan dan ketepatan waktu persetujuan anggaran, jaminan regulasi untuk merubah proposal anggaran, persetujuan perubahan anggaran belanja dan kelebihan pendapatan, wewenang penambahan anggaran, kewenangan menyetujui anggaran darurat dan memeriksa laporan audit.

Open Budget Survey (OBS) menilai apakah institusi audit keuangan diberikan kekuasaan yang efektif untuk mengawasi anggaran secara efektif dengan menggunakan empat indikator: otoritas untuk mengganti kepala lembaga audit, jaminan aturan dalam mengaudit seluruh keuangan publik, ketersediaan sumber pembiayaan, dan ketersediaan tenaga audit yang profesional

Indonesia memiliki pengawasan anggaran yang kuat dan lemah dalam keterlibatan publik dibandingkan dengan negara lainnya di Southeast Asia.

Negara	Kekuatan Legislatif	Kekuatan Lembaga Audit	Keterlibatan Publik
Kamboja	Cukup	Cukup	Lemah
Timór-Leste	Cukup	Kuat	Lemah
Indonesia	Kuat	Kuat	Lemah
Malaysia	Cukup	Kuat	Lemah
Myanmar	Lemah	Lemah	Lemah
Filipina	Cukup	Kuat	Cukup
Thailand	Kuat	Kuat	Lemah
Vietnam	Kuat	Kuat	Lemah

Kuat: skor rata-rata di atas 66 dari 100, **Cukup:** skor rata-rata antara 34 dan 66, **Lemah:** skor rata-rata dibawah 34.

Rekomendasi

International Budget Partnership (IBP) merekomendasikan kepada Indonesia untuk melaksanakan beberapa hal dalam meningkatkan pengawasan anggaran:

- Legislatif harus memiliki unit kajian anggaran khusus untuk membantu menganalisis anggaran, eksekutif harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari legislatif untuk menggunakan anggaran dari kelebihan pendapatan yang diperoleh selama pelaksanaan anggaran (lihat pertanyaan 97 dan 104 dalam kuesioner OBS).
- Anggaran untuk lembaga audit keuangan harus ditentukan oleh legislatif, dan keuangannya juga harus sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh lembaga audit untuk melaksanakan mandatnya (lihat pertanyaan 93 dalam kuesioner OBS).

Kesempatan Partisipasi Publik

Pengalaman riset dan advokasi masyarakat sipil selama lebih dari 15 tahun menunjukkan bahwa transparansi saja tidak cukup untuk meningkatkan tata kelola. Transparansi yang disertai kesempatan partisipasi publik dalam penganggaran dapat memaksimalkan hasil positif dari keterbukaan anggaran. Oleh karena itu, Open Budget Survey juga menilai kesempatan yang disediakan kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan anggaran di tingkat Nasional. Kesempatan tersebut bisa disediakan selama seluruh proses penganggaran oleh eksekutif, legislatif serta lembaga audit.

Berdasarkan indikator-indikator ini, Open Budget Survey 2012 menemukan bahwa kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran di Indonesia masih lemah.

Indonesia memiliki ruang agar bisa meningkatkan partisipasi publik

Kebutuhan	Temuan
Proses Sebelum terjadinya Konsultasi publik	
Syarat formal untuk partisipasi publik (Q114)	Tidak ada
Penyampaian tujuan dalam partisipasi publik (Q115)	Tidak ada
Komunikasi lembaga audit (BPK) selain publikasi laporan hasil audit (Q124)	Ada dan kuat
Proses Konsultasi Publik	
Mekanisme yang dikembangkan eksekutif untuk partisipasi dalam perencanaan (Q116)	Tidak ada
Dengar pendapat di legislatif mengenai kerangka ekonomi makro (Q119)	Tidak ada
Dengar pendapat di legislatif mengenai anggaran masing-masing lembaga (Q120)	Ada tapi lemah
Kesempatan publik di legislatif untuk berpendapat selama dengar pendapat anggaran (Q121)	Ada tapi lemah
Mekanisme yang dikembangkan oleh eksekutif untuk berpartisipasi selama pelaksanaan anggaran (Q117)	Tidak ada
Pengembangan mekanisme oleh BPK untuk partisipasi dalam agenda audit (Q123)	Ada tapi lemah
Proses Setelah Konsultasi Publik	
Tanggapan oleh eksekutif mengenai masukan yang diberikan oleh publik (Q118)	Tidak ada
Laporan yang dikeluarkan legislatif pada rapat dengar pendapat anggaran (Q122)	Ada tapi lemah
Tanggapan oleh BPK mengenai masukan yang diberikan oleh publik (Q125)	Tidak ada

Rekomendasi

International Budget Partnership merekomendasikan Indonesia untuk memperluas keterlibatan publik dalam penganggaran berdasarkan indikator survey keterbukaan anggaran yang menunjukkan masih lemah (lihat tabel dibawah dan pertanyaan 114-123 dan 125 dalam kuesioner OBS).

Deskripsi Survey, Metodologi, Realibilitas, Informasi dan Kontak Peneliti

Penelitian OBS adalah penelitian berdasarkan fakta yang mudah diobservasi kejadiannya untuk menilai apa yang terjadi sebenarnya dalam praktik. Kesimpulan penelitian biasanya didukung oleh kutipan dan komentar, termasuk referensi dokumen penganggaran, peraturan, dan dokumen publik lainnya; pernyataan pejabat publik pemerintah atau dari wawancara langsung dengan pejabat pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Survey ini dikompilasi dari kuesioner yang sudah dilengkapi dari semua negara oleh ahli anggaran independen yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Semua kuesioner masing-masing negara kemudian dikaji oleh ahli (*disamarkan/anonim*) yang juga tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Selanjutnya, IBP mengundang pemerintah nasional untuk memberikan komentar mengenai draft hasil survey kemudian mempertimbangkan komentar tersebut sebelum hasil survey di-finalkan. Proses pelaksanaan penelitian untuk 2012 dilakukan selama 18 bulan antara bulan Juli 2011 sampai Desember 2012 dan melibatkan sekitar 400 ahli.

OBS menyajikan sumber-sumber data terpercaya mengenai praktik transparansi penganggaran nasional untuk pemerintah, praktisi pembangunan, media dan masyarakat. Pengguna hasil survey termasuk Open Government Partnership (OGP) Collaborative Africa Budget Reform Initiative, INTOSAI, Bank Dunia dalam Worldwide Governance Indicator, serta beberapa lembaga bantuan bilateral dan lembaga-lembaga untuk kerjasama internasional dan multilateral. Publikasi OBS tahun 2012 ini telah memantapkan posisinya sebagai sumber data global dalam transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran.

Penyelesaian penelitian OBS di Negara ini dilakukan oleh Lukman Hakim dan Yuna Farhan dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) di Mampang Prapatan IV Jln K No.37 Jakarta Selatan-Indonesia (sekretariat@seknasfitra.org). Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komentar pada draft hasil kuesioner OBS.